



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH PMK JELANG IDUL ADHA

Teddy Prasetiawan

Peneliti Muda

teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak ditemukannya kasus pertama penyakit mulut dan kuku (PMK) di Gresik pada 28 April lalu dan sejak ditetapkannya 5 kabupaten di 2 provinsi sebagai daerah wabah PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian, kasus PMK menunjukkan peningkatan dramatis mencapai 150.630 kasus dan telah menyebar di 180 kabupaten/ kota di 18 provinsi. Dari 150.630 ternak terjangkit yang didominasi oleh ternak sapi tersebut, 39.887 diantaranya sembuh, 695 mati, dan 893 dipotong (data per 13 Juni).

Penanganan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi wabah ini adalah penataan lalu lintas hewan di daerah wabah PMK, penutupan pasar hewan, desinfeksi massal, dan pembentukan gugus tugas penanganan PMK. Selain itu, pemerintah juga berencana mengimpor 3 juta dosis vaksin darurat pada pertengahan Juni ini dari Perancis, 500 ribu sampai 1 juta dosis dari Australia dan 100 ribu dosis dari Selandia Baru pada tengah Juli mendatang, serta menyiapkan 1 juta dosis vaksin produksi Pusat Veteriner Farma Surabaya hingga Desember 2022. Nyatanya, upaya pemerintah tersebut belum mampu mengendalikan wabah PMK hingga saat ini.

Kembali menjadi negara bebas PMK bukanlah pekerjaan yang mudah dan tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bercermin dari kemampuan mengatasi PMK pada tahun 1983 lalu, dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mengklaim secara sepihak bahwa Indonesia bebas PMK, 4 tahun untuk diakui ASEAN, dan 7 tahun untuk diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Karena itu, mustahil bagi Indonesia untuk bebas PMK jelang Idul Adha tahun ini, dimana permintaan terhadap hewan kurban yang sehat dan bebas PMK menjadi harapan kita bersama. Perlu dipahami bahwa mengatasi PMK tidak hanya dalam rangka menghadapi Idul Adha saja, melainkan merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Idul Adha justru perlu dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dan penyebaran PMK. Penyediaan hewan kurban akan menyebabkan lalu lintas ternak tak terhindarkan yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus PMK semakin sulit dikendalikan. Kita akan menghadapi dilema. Di satu sisi berupaya menyediakan hewan kurban yang sehat dengan harga terjangkau, tetapi di sisi lain penyebaran virus PMK tetap harus ditekan. Harapannya wabah PMK tidak makin menjadi-jadi pasca-Idul Adha agar beban pengendalian dan kerugian ekonomi yang diderita tidak semakin besar.

Beberapa langkah yang perlu diprioritaskan menghadapi Idul Adha, antara lain: *pertama*, meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak, terutama dari daerah wabah dilengkapi dengan pengecekan surat keterangan kesehatan hewan untuk setiap ternak yang diperjual-belikan atau yang melintas batas daerah. Pengawasan yang dilakukan di bawah koordinasi Gugus Tugas Penanganan PMK serta melibatkan pemerintah daerah, TNI/Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan petugas karantina. *Kedua*, melakukan pengawasan terhadap

lapak penjual kurban dadakan di luar pasar hewan resmi dengan menerapkan protokol ketat (*biosecurity*). Bahkan untuk daerah sentra wabah perlu dipertimbangkan upaya penutupan sementara pasar hewan dan pelarangan lapak dadakan. Namun, perdagangan ternak tetap dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan peternak. *Ketiga*, penerapan karantina hewan kurban selama 14 hari sebelum dijual atau didistribusikan kepada masyarakat. *Keempat*, menyosialisasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 32 Tahun 2022 yang menyatakan hewan yang terkena PMK dengan gejala berat, seperti lepuh pada kuku hingga terlepas, pincang, atau bertubuh sangat kurus, tidak sah dijadikan hewan kurban, secara luas kepada seluruh umat Islam.

Selain langkah antisipasi jelang Idul Adha di atas, upaya pengendalian wabah untuk jangka menengah dan panjang perlu terus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Komisi IV DPR RI telah menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,- untuk penanganan wabah PMK. Komisi IV DPR RI pun telah mendesak Kementerian Keuangan melalui Kementan untuk mengalokasikan anggaran *automatic adjustment* tahap I sebesar Rp680.488.248.000,- dan tahap II sebesar Rp490.932.278.000,- untuk penanganan PMK. Alokasi anggaran diperuntukkan untuk pengadaan vaksin, operasional vaksin, penandaan dan pendataan, logistik pendukung termasuk distribusinya, obat-obatan, disinfektan, koordinasi dan advokasi, alat dan mesin produksi vaksin hingga kompensasi depopulasi ternak.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan melekat kepada pemerintah dalam mengatasi wabah PMK, termasuk mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaraan vaksinasi yang jumlahnya tidak sedikit, agar anggaran yang tersedia tepat sasaran dan efektif dalam mengendalikan wabah PMK. Dalam konteks Idul Adha, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk membuat dan menyosialisasikan secara luas prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK.

Perlu dipahami bersama bahwa dampak dari wabah PMK ini tidak hanya menyebabkan penurunan produktivitas komoditas peternakan, tetapi lebih dari itu. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Prism (2002) bahwa selain berdampak pada usaha ternak, wabah PMK juga berdampak pada bisnis hotel dan restoran (52%), sektor pertanian (58%), perdagangan (47%), industri manufaktur (42%), transportasi (42%), jasa dan pelayanan (55%), bisnis finansial (23%) dan konstruksi (49%). Oleh karena itu, pengendalian wabah PMK perlu terus didukung oleh DPR RI hingga Indonesia kembali menjadi negara bebas PMK.

Sumber

dpr.go.id, 13 Juni 2022;

ekonomi.bisnis.com, 17 Mei 2022;

Kontan, 13 & 14 Juni 2022;

Media Indonesia, 10 & 14 Juni 2022; dan

Republika, 11 & 13 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022